



Dampak Kemiskinan terhadap Kualitas Pendidikan Anak di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan yang Efektif

Chika Maharani, Devi Amelia Ningrum, Aulia Eka Fatmawati, Arif Fadilla*

Universitas Singaperbangsa Karawang, Jawa Barat, Indonesia

*Correspondence: Arif Fadilla
Email: Ariffadila@fe.unsika.ac.id

Received: 17 Jan 2024
Accepted: 29 Mar 2024
Published: 31 Mar 2024



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Kemiskinan di Indonesia merupakan tantangan serius dalam pembangunan nasional, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan anak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak kemiskinan pada pendidikan anak dengan menggunakan metode deskriptif analisis terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan mempengaruhi akses pendidikan anak dan memiliki dampak multidimensional, termasuk kriminalitas, kesehatan, akses pendidikan, pengangguran, dan konflik sosial. Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia melibatkan pendekatan tidak langsung dan langsung, serta program-program bantuan sosial. Kesimpulannya, pemahaman yang mendalam tentang dampak kemiskinan penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam mengatasi kemiskinan dan mendorong pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kemiskinan, Pendidikan, Anak, Kebijakan, Dampak

Abstract: Poverty in Indonesia is a serious challenge in national development, affecting various aspects of life including children's education. This study aims to understand the impact of poverty on children's education by using a descriptive method of analyzing secondary data. The results show that poverty affects children's access to education and has a multidimensional impact, including crime, health, access to education, unemployment and social conflict. Poverty reduction efforts in Indonesia involve indirect and direct approaches, as well as social assistance programs. In conclusion, an in-depth understanding of the impact of poverty is important to formulate effective policies to overcome poverty and promote equitable and sustainable development.

Keywords: Poverty, Education, Children, Policy, Impact

Pendahuluan

Masalah kemiskinan di Indonesia telah menjadi fokus utama dalam proses pembangunan nasional. Kemiskinan tidak hanya menjadi masalah ekonomi, tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan anak. Pasal 33 dari Undang-Undang Dasar 1945 menekankan bahwa kemiskinan merupakan masalah serius yang terkait dengan banyak faktor seperti pendidikan, pendapatan, pengangguran, geografis, karakter, dan budaya. Kemiskinan tidak hanya terbatas pada daerah pedesaan, tetapi juga terjadi di perkotaan. Masalah ini telah ada sejak sebelum era reformasi Indonesia dan merupakan tantangan kompleks yang dihadapi oleh semua pemerintahan di dunia, termasuk Indonesia.

Dalam konteks pendidikan, Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) menjadi landasan hukum yang penting. Menurut undang-undang ini, pendidikan adalah usaha yang disengaja untuk menciptakan suatu lingkungan di mana peserta didik dapat secara aktif memanfaatkan proses belajar untuk mewujudkan potensinya. Pendidikan diharapkan dapat membantu siswa berkembang menjadi individu yang cerdas, bermoral tinggi, dan memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi hambatan utama dalam mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas untuk semua anak. Anak-anak dari keluarga miskin sering kali menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pendidikan yang layak, termasuk biaya sekolah, seragam, buku, dan biaya lainnya. Dampak psikologis kemiskinan juga dapat mempengaruhi motivasi dan kualitas belajar anak-anak. Selain itu, lingkungan belajar yang kurang memadai di sekolah-sekolah daerah miskin juga menjadi masalah serius yang perlu diperhatikan.

Dalam konteks ini, penelitian tentang dampak kemiskinan pada pendidikan anak di Indonesia sangat penting. Penelitian ini tidak hanya akan membantu memahami hubungan antara kemiskinan dan akses pendidikan, tetapi juga dapat memberikan wawasan tentang dampak psikologis kemiskinan pada anak-anak, serta kondisi lingkungan belajar anak-anak dari keluarga miskin. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini, diharapkan pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat dapat mengembangkan kebijakan dan program yang lebih efektif untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari latar belakang ekonomi rendah.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara detail suatu permasalahan kemiskinan penduduk dengan pendekatan yang didasarkan pada kriteria ukuran kemiskinan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan dan menganalisis karakteristik kemiskinan dalam populasi tertentu tanpa melakukan manipulasi variabel atau menguji hipotesis. Metode deskriptif analisis memungkinkan peneliti untuk menyajikan data dengan cara yang sistematis dan terstruktur, memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan literatur yang relevan dengan judul tulisan dan referensi lainnya. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan lain, tetapi dapat digunakan kembali untuk tujuan analisis yang berbeda. Dalam konteks penelitian tentang kemiskinan penduduk, data sekunder dapat berupa data survei, laporan pemerintah, publikasi akademis, atau sumber informasi lain yang relevan. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan informasi yang telah ada tanpa perlu menghabiskan waktu dan sumber daya untuk mengumpulkan data baru, sehingga mempercepat proses penelitian dan memungkinkan analisis yang lebih

mendalam tentang fenomena kemiskinan penduduk.

Dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan data sekunder, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kemiskinan penduduk dengan menganalisis berbagai dimensi dan karakteristiknya. Hasil analisis yang dihasilkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan atau intervensi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan penduduk, serta memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang dinamika kemiskinan dalam konteks yang lebih luas.

Hasil dan Pembahasan

Kemiskinan, sebagai satu permasalahan yang serius, telah menjadi sorotan dalam konteks pembangunan nasional di Indonesia, meskipun pemerintah telah menerapkan sejumlah upaya dengan memperkenalkan paket dan program yang melibatkan para ahli dalam mengatasi masalah ini. Namun, penanganan kemiskinan terus menjadi tantangan yang sulit diatasi secara tuntas. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana sejumlah penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum, sehingga mereka terdampar di bawah standar kebutuhan tersebut. Penentuan kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pun mengacu pada pendekatan kebutuhan dasar. Berbagai teori, seperti teori Neo Liberal dan teori Marjinal, memberikan pemahaman tentang penyebab kemiskinan, mulai dari faktor individu seperti kelemahan dan pilihan, hingga budaya kemiskinan yang meliputi sikap pasif, kurangnya usaha, dan rendahnya ambisi untuk memperbaiki masa depan.

Kemiskinan juga ditandai dengan keterbatasan modal, rendahnya tingkat pendidikan, serta kesempatan yang terbatas dalam berpartisipasi dalam pembangunan. Sejumlah definisi oleh lembaga dan ahli, seperti BAPPENAS, Levitan (1980) dalam Papilaya, J. (2020), serta Faturchman dan Marcelinus Molo (1994) dalam Papilaya, J. (2020), menegaskan bahwa kemiskinan bukanlah sesuatu yang dikehendaki oleh individu miskin, melainkan lebih sebagai hasil dari keadaan yang tidak dapat dihindari dengan sumber daya yang dimilikinya. Dengan demikian, kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi semata, namun juga merupakan masalah multidimensional yang terkait dengan aspek sosial, politik, dan kesempatan yang tidak merata dalam masyarakat. Kemiskinan menjadi cerminan dari interaksi kompleks antara individu dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang menuntut pendekatan yang komprehensif dan terpadu dalam penanganannya.

Masalah serius dalam proses pembangunan nasional di Indonesia adalah kemiskinan, sebuah permasalahan yang telah menjadi fokus utama pemerintah. Meskipun telah diperkenalkan berbagai paket dan program yang melibatkan para ahli kemiskinan, penyelesaian tantangan ini tetap menantang. Kemiskinan diartikan sebagai keadaan di mana sejumlah penduduk tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal dan hidup di bawah standar tersebut. Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kebutuhan esensial. BPS

menegaskan bahwa kemiskinan menandakan ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar yang esensial untuk hidup yang layak, baik dalam bentuk bahan pangan maupun non-pangan.

Kemiskinan juga dapat diinterpretasikan sebagai situasi di mana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mengubah keadaan ekonomi dan sosialnya, yang tercermin dalam rendahnya produktivitas, kemauan untuk maju yang lemah, dan terbatasnya modal, pendidikan, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi (Hardana, A. 2023). Kemiskinan, dalam beragam definisinya, menggambarkan kondisi ketidakmampuan individu atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini mencakup aspek-aspek seperti aset, sumber keuangan, organisasi sosial-politik, jaringan sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kemiskinan bisa dilihat sebagai suatu kondisi yang kompleks, bukan sekadar hasil akhir tetapi juga sebagai proses interaksi individu dengan lingkungannya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penyebab kemiskinan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama: kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alamiah muncul sebagai akibat dari sumber daya yang langka dan perkembangan teknologi yang rendah. Sementara itu, kemiskinan buatan terjadi karena struktur sosial yang tidak merata, sehingga anggota masyarakat tidak memiliki akses yang setara terhadap sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas. Selain itu, kemiskinan juga bisa disebabkan oleh perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Dalam realitasnya, individu-individu yang terjebak dalam kondisi kurang menguntungkan, seperti memiliki keterbatasan sumber daya, kinerja yang rendah, pendapatan yang minim, tabungan yang terbatas, dan investasi yang kurang optimal, merupakan kelompok yang mengalami kemiskinan (Nasution & Marliyah, 2023).

Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan kemiskinan, yang secara langsung dipengaruhi oleh rendahnya kualitas pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Chang dan Shi pada tahun 2016, seperti yang dikutip oleh Akhmad pada tahun 2021, menunjukkan bahwa investasi dalam Sumber Daya Manusia dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan inovasi dan penerapan teknologi. Dengan meningkatnya modal SDM, produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Hasil penelitian oleh Suliswanto (2010) dalam Akhmad, K. A. (2021) juga menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM dapat berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan. Pembentukan modal manusia menjadi aspek krusial dalam pembangunan ekonomi dan politik suatu negara. Proses ini melibatkan upaya untuk meningkatkan jumlah individu yang memiliki keterampilan, pendidikan, dan pengalaman yang relevan untuk mendukung pertumbuhan dan kemajuan suatu masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), yang pada gilirannya memberikan peluang yang lebih luas dan lebih baik untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan upah yang memadai (Asnawi, Kindangen, & Engka, 2021). Menurut Fadilla, A. (2017) berbagai hasil penelitian juga

menunjukkan bahwa pendidikan dasar memberikan kontribusi yang paling tinggi diantara semua jenis investasi dan bahkan lebih besar dari pada tingkat pengembalian yang dihasilkan dari kebanyakan proyek infrastruktur publik. Demikian, pemahaman dan peningkatan kualitas SDM menjadi kunci dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai pembangunan yang berkelas.

Kemiskinan, menurut Papilaya, J. (2020), dapat diidentifikasi melalui sejumlah indikator yang mencerminkan berbagai aspek kehidupan. Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Kenaikan pendapatan per kapita dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta memiliki dampak signifikan dalam mengurangi jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan (Purnomo, Istiqomah, & Suharno, 2020). Selain itu, ketika masyarakat atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya yang meliputi pangan, sandang, dan papan. Kurangnya akses terhadap layanan penting seperti air bersih, kondisi sanitasi, pendidikan, layanan kesehatan, dan transportasi adalah tanda lainnya. Kemiskinan juga bermanifestasi sebagai ketidakmampuan merencanakan masa depan, yang dapat disebabkan oleh kurangnya komitmen terhadap keluarga dan pendidikan. Kerentanan terhadap berbagai risiko, baik risiko pribadi maupun sosial, serta kualitas sumber daya manusia yang rendah dan sumber daya alam yang terbatas merupakan ciri-ciri kemiskinan lainnya.

Kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya apresiasi terhadap kegiatan sosial, sulitnya mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang stabil, serta kesulitan memulai usaha karena cacat fisik atau mental. Selain itu, disabilitas dan ketergantungan sosial seperti keadaan anak terlantar, perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, janda miskin, serta masyarakat yang terisolasi dan terpinggirkan juga masuk dalam definisi kemiskinan.

Masih menjadi tantangan bagi Indonesia adalah kemiskinan, yang belum sepenuhnya teratasi sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah, sebagaimana terbukti dari angka persentase penduduk miskin yang masih di atas target yang ditetapkan. Pemerintah menetapkan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020–2024 untuk proporsi penduduk miskin berkisar antara 7,5% hingga 6,5%. Meski demikian, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan tetap berada pada angka 9% antara tahun 2020 hingga 2022. Lebih lanjut, data BPS pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia mengalami penurunan proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan. kemungkinan akan mengalami stagnasi.

Temuan analisis deskriptif menunjukkan bahwa terjadi penurunan proporsi penduduk miskin di setiap provinsi di Indonesia. Bagi mereka yang berusia di atas 15 tahun, masa sekolah adalah delapan hingga sembilan tahun, dan lebih dari separuh penduduk di setiap provinsi siap memasuki dunia kerja. Berdasarkan analisis inferensial, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), rata-rata lama pendidikan penduduk berusia di atas 15 tahun, dan produk domestik bruto (PDRB) per kapita semuanya menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Selain itu, rata-rata lamanya orang dewasa berusia di

atas 15 tahun menyelesaikan pendidikan mempunyai dampak yang lebih besar terhadap penurunan kemiskinan dibandingkan TPAK atau PDB per kapita.

Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Raskin, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), untuk mengatasi kemiskinan, data BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan masih tinggi. Sebagaimana diungkapkan oleh Suharto (2013) yang dikutip oleh Akhmad (2021), kegagalan program-program tersebut dapat disebabkan oleh fokusnya yang lebih kepada mengurangi kerentanan dan kesengsaraan daripada merespons akar permasalahan kemiskinan secara menyeluruh. Fenomena kemiskinan memiliki dampak serius terhadap pembangunan manusia karena merupakan masalah kompleks yang bermula dari ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang pada akhirnya dapat mengabaikan kebutuhan lainnya.

Kemiskinan dan rendahnya kualitas pendidikan merupakan dua permasalahan serius dalam pembangunan nasional Indonesia. Kemiskinan, sebagai akar permasalahan, sering kali menjadi hambatan utama bagi individu-individu dalam memperoleh akses pendidikan yang berkualitas. Hindun, Soejoto, dan Hariyati (2019) menegaskan bahwa peningkatan tingkat pendidikan secara langsung berkorelasi dengan peningkatan tingkat penghasilan individu. Menurut Andi Agustang, dkk dalam Larasati, M. (2022), rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pendidikan yang rendah. Hal ini tercermin dalam kurangnya tujuan pembelajaran yang jelas, fokus pada standar hasil tanpa memperhatikan proses, serta orientasi pada pencapaian standar pendidikan saja tanpa memperhatikan efektivitas dan kegunaan pendidikan yang diperoleh. Selain itu, rendahnya kualitas sarana fisik, seperti gedung sekolah yang rusak, fasilitas pembelajaran yang tidak memadai, dan kualitas guru yang kurang memadai juga turut menyumbang terhadap rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia.

Kondisi sarana fisik pendidikan yang kurang memadai, seperti gedung sekolah yang rusak dan fasilitas pembelajaran yang tidak standar, menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini membuat proses pembelajaran menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Selain itu, rendahnya kualitas guru juga menjadi masalah serius. Banyak guru yang belum memiliki tingkat profesionalisme yang memadai dalam menjalankan tugas mengajar. Kesejahteraan guru juga menjadi perhatian penting, karena rendahnya kesejahteraan dapat berdampak negatif pada kualitas pengajaran yang diberikan.

Selain faktor internal, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan juga menjadi masalah serius. Di Indonesia, masih terdapat kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara masyarakat kaya dan miskin. Hal ini disebabkan oleh biaya pendidikan yang mahal, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Akibatnya, banyak individu yang terpaksa menghentikan pendidikan mereka atau memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan demi menghindari beban biaya yang berat. Menurut Sinaga et al. (2023) Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan rendahnya keterampilan dan kemampuan masyarakat.

Selain itu, kehadiran komunitas imigran yang melakukan urbanisasi tanpa memiliki cukup uang juga mempengaruhi tingkat kemiskinan. Karena kurangnya pendidikan dan pengalaman, komunitas migran ini sering kali kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak di wilayah metropolitan. Akibatnya, pendapatan mereka relatif rendah dan tidak mampu menutupi pengeluaran pokok mereka.

Kemiskinan dan rendahnya kualitas pendidikan merupakan dua masalah serius yang saling terkait dalam konteks pembangunan nasional Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya yang terkoordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam bidang pendidikan, baik dalam hal infrastruktur maupun kualitas sumber daya manusia, seperti guru dan tenaga pendidik. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan memberikan bantuan finansial kepada masyarakat yang kurang mampu agar dapat mengakses pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, diharapkan masalah kemiskinan dan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dapat diminimalisir dan pembangunan nasional dapat berjalan lebih baik.

Tingkat pendidikan masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor kemiskinan. Dampak kemiskinan masih dirasakan oleh banyak orang, termasuk anak-anak, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti bantuan keuangan desa, bantuan keuangan BOS untuk anak usia sekolah, dan bantuan Raskin untuk masyarakat. Keluarga dengan pendapatan rendah sering kali kesulitan memenuhi kebutuhan dasar anak-anaknya. Kehidupan anak-anak ini terdampak oleh kemiskinan orang tuanya, hingga hak-haknya dilanggar. Karena alasan keuangan, anak-anak yang seharusnya memiliki masa kecil yang bahagia dan pendidikan terpaksa berkompromi.

Mereka terpaksa putus sekolah agar bisa bekerja demi memenuhi kebutuhan keuangan keluarga. Faktanya, karena menghambat aktivitas bermain dan pendidikan, hal ini dapat membahayakan kesehatan dan perkembangan mereka. Selain itu, kemiskinan mempunyai dampak lain. Pertama, karena masyarakat miskin sering kali menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, maka terjadi peningkatan kejahatan di wilayah tersebut. Kedua, angka kematian meningkat karena sulitnya mendapatkan akses kesehatan yang memadai. Ketiga, akses pendidikan tertutup karena masyarakat miskin tidak mampu membayar pendidikan yang memadai. Keempat, meningkatnya angka pengangguran karena kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang layak. Kelima, munculnya konflik antar masyarakat karena adanya kesenjangan yang memicu kecemburuan di masyarakat. Pemahaman yang mendalam mengenai dampak kemiskinan sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk mengatasi kemiskinan dan mendorong pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia mengadopsi dua pendekatan utama, yakni kebijaksanaan tidak langsung dan kebijaksanaan langsung. Pendekatan tidak langsung difokuskan pada penciptaan kondisi yang mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, seperti stabilitas sosial politik, keberlanjutan ekonomi, dan pembangunan budaya yang inklusif. Ini termasuk upaya pengaturan ekonomi makro melalui kebijakan keuangan dan perpajakan yang hati-hati, serta pengendalian tingkat

inflasi untuk memastikan harga kebutuhan dasar tetap terjangkau bagi penduduk miskin. Pendekatan langsung dalam penanggulangan kemiskinan menekankan peningkatan partisipasi serta produktivitas sumber daya manusia, khususnya di kalangan masyarakat dengan pendapatan rendah. Upaya ini melibatkan penyediaan kebutuhan esensial seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, dan akses pendidikan. Selain itu, pendekatan ini juga melibatkan pembangunan program-program sosial ekonomi yang berkelanjutan, bertujuan untuk meningkatkan kemandirian kelompok masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai fokus utama dalam agenda pembangunan nasional, yang tercermin dalam dokumen perencanaan tahunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Untuk mengurangi kemiskinan, pemerintah meluncurkan sejumlah program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dijalankan oleh Kementerian Sosial. Program-program ini bertujuan memberikan bantuan kepada keluarga miskin guna memenuhi kebutuhan dasar mereka. Evaluasi terus dilakukan terhadap efektivitas program-program tersebut, dengan beberapa skema bantuan seperti Raskin dan Bansos penanganan kemiskinan ekstrem masih dinilai belum optimal. Selain itu, untuk mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh, diperlukan langkah-langkah strategis seperti perluasan akses keuangan, perbaikan fokus pada kemiskinan dalam perencanaan nasional, pengembangan sistem jaminan sosial komprehensif, investasi dalam kesehatan dan sanitasi, serta perkuatan peraturan ketenagakerjaan yang lebih fleksibel.

Pendekatan berkelanjutan dalam penanggulangan kemiskinan sangat penting, mengingat kemiskinan akan selalu menjadi masalah yang harus diatasi. Melalui pendidikan yang berkelanjutan, diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan dapat mencapai hasil yang signifikan, karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini tetapi juga di masa depan.

Simpulan

Kemiskinan adalah masalah serius dalam pembangunan nasional Indonesia, meskipun pemerintah telah mengenalkan program-program untuk mengatasinya. Kemiskinan bukanlah hasil kehendak individu, tetapi akibat dari keadaan yang tidak dapat dihindari dengan sumber daya yang dimiliki. Ini juga merupakan masalah multidimensional yang terkait dengan aspek ekonomi, sosial, politik, dan kesempatan yang tidak merata dalam masyarakat. Dampaknya dirasakan dalam pendidikan, kesehatan, kriminalitas, akses pendidikan, pengangguran, dan konflik sosial. Pemahaman ini penting dalam merumuskan kebijakan efektif untuk mengatasi kemiskinan dan mendorong pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.

Di Indonesia, penanggulangan kemiskinan mengadopsi dua pendekatan utama,

yaitu kebijakan tidak langsung dan langsung. Ini melibatkan upaya penciptaan kondisi mendukung, seperti stabilitas sosial politik, keberlanjutan ekonomi, dan pembangunan budaya inklusif. Program bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan BLT juga menjadi instrumen utama. Untuk mengentaskan kemiskinan, diperlukan langkah-langkah seperti perluasan akses keuangan, fokus pada kemiskinan dalam perencanaan nasional, pengembangan jaminan sosial komprehensif, investasi dalam kesehatan dan sanitasi, serta peraturan ketenagakerjaan yang fleksibel. Dengan pendekatan berkelanjutan, diharapkan upaya ini dapat mencapai hasil signifikan.

Daftar Pustaka

- Akhmad, K. A. (2021). Peran pendidikan kewirausahaan untuk mengatasi kemiskinan. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(06), 173-181.
- Asnawi, R., Kindangen, P., & Engka, D. S. (2021). Pengaruh Pendidikan, Program Keluarga Harapan Dan Program Rumah Tinggal Layak Huni Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 21(2), 109-126.
- Azahari, R. (2020). Pengaruh Kemiskinan Dan Pendidikan Terhadap Kesehatan Masyarakat. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 8(1), 56-63.
- Fadilla, A. (2017). Analisis Kebijakan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kota Tangerang Provinsi Banten. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(2), 38-47
- Firmansyah, A., & Khairunnisa, D. (2023). Dampak Pendidikan Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Dengan Menggunakan Analisis Data Panel: Dampak Pendidikan Terhadap Pengentasan Kemiskinan. *Emerging Statistics and Data Science Journal*, 1(2), 227-237.
- Hardana, A. (2023). Hubungan antara kemiskinan dan pendidikan di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi. *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 7-19.
- Hindun, H., Soejoto, A., & Hariyati, H. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 8(3), 250-265.
- Isnaini, N. S., & Azizah, F. Z. (2020). Pentingnya Pendidikan Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Indonesia. *Researchgate. Net*, August.
- Larasati, M. (2022). Kualitas Pendidikan di Indonesia. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 2(5), 709-714.
- Nasution, R., & Marliyah, M. (2023). ANALISIS PROGRAM PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI KECAMATAN PULAU RAKYAT KABUPATEN ASAHAN. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 6(1), 810-823.
- Nursita, L. (2022). Pendidikan pekerja anak: dampak kemiskinan pada pendidikan. *Jambura Economic Education Journal*, 4(1), 1-15.
- Papilaya, J. (2020). Kebijakan Publik Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal bimbingan*

dan konseling terapan, 4(1).

- Rahman, P. A., Firman, F., & Rusdinal, R. (2019). Kemiskinan dalam perspektif ilmu sosiologi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 3(3), 1542-1548.
- Retnaningsih, T. K., Rahayu, H. C., & Gitya, F. (2024). Narrative Literature Review: Penelitian tentang Efektivitas Program Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 13(01).
- Sinaga, M., Damanik, S. W. H., Zalukhu, R. S., Hutaaruk, R. P. S., & Collyn, D. (2023). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Per Kapita Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kepulauan Nias. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 140-152.
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2019). Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di DKI Jakarta. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 5(4), 340-350.
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2021). Pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(2), 271-278.
- Wulandari, S., Dasopang, A. P., Rawani, G. A., Has Fizetty, I., Sofian, M. Y., Dwijaya, R., & Rachmalija, S. (2022). Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3209-3218.
- Zakaria, J. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di kota makassar. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2), 41-53.